



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, daerah diberikan dana alokasi khusus nonfisik;
- b. bahwa dana alokasi khusus nonfisik diberikan kepada pemerintah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak;
- c. bahwa untuk menguraikan rencana dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan daerah penerima dan rincian dana alokasi khusus nonfisik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rincian Anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Rincian Anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. melaksanakan kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
 - c. menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2023

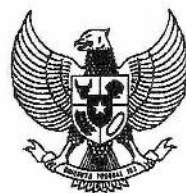
No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	Total
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
1	Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	217.500.000	80	93.750.000	6	63.750.000	40	375.000.000
2	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Barat	254.504.000	70	109.700.000	15	74.596.000	116	438.800.000
3	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Utara	254.504.000	150	109.700.000	15	74.596.000	50	438.800.000
4	Provinsi Aceh	Kabupaten Bireuen	254.504.000	72	109.700.000	4	74.596.000	60	438.800.000
5	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	346.840.000	60	149.500.000	7	101.660.000	95	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
6	Provinsi Aceh	Kota Sabang	346.840.000	56	149.500.000	20	101.660.000	80	598.000.000
7	Provinsi Aceh	Kota Langsa	346.840.000	80	149.500.000	15	101.660.000	66	598.000.000
8	Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe	346.840.000	270	149.500.000	23	101.660.000	65	598.000.000
9	Provinsi Aceh	Kabupaten Bener Meriah	346.840.000	112	149.500.000	17	101.660.000	140	598.000.000
10	Provinsi Aceh	Kabupaten Pidie Jaya	346.840.000	224	149.500.000	17	101.660.000	71	598.000.000
11	Provinsi Aceh	Kota Subulussalam	346.840.000	56	149.500.000	23	101.660.000	75	598.000.000
12	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	254.504.000	74	109.700.000	8	74.596.000	80	438.800.000
13	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	254.504.000	720	109.700.000	13	74.596.000	195	438.800.000
14	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	254.504.000	510	109.700.000	6	74.596.000	341	438.800.000
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	254.504.000	40	109.700.000	14	74.596.000	68	438.800.000
16	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo	254.504.000	140	109.700.000	4	74.596.000	55	438.800.000
17	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu	254.504.000	20	109.700.000	5	74.596.000	40	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
18	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara	346.840.000	60	149.500.000	7	101.660.000	82	598.000.000
19	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	254.504.000	214	109.700.000	14	74.596.000	48	438.800.000
20	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	346.840.000	138	149.500.000	18	101.660.000	380	598.000.000
21	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	254.504.000	30	109.700.000	5	74.596.000	180	438.800.000
22	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	254.504.000	50	109.700.000	14	74.596.000	100	438.800.000
23	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	254.504.000	650	109.700.000	4	74.596.000	70	438.800.000
24	Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai	217.500.000	400	93.750.000	12	63.750.000	26	375.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	254.504.000	110	109.700.000	14	74.596.000	40	438.800.000
26	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	254.504.000	93	109.700.000	16	74.596.000	98	438.800.000
27	Provinsi Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	254.504.000	45	109.700.000	13	74.596.000	65	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
28	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	254.504.000	45	109.700.000	21	74.596.000	70	438.800.000
29	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	346.840.000	1.200	149.500.000	18	101.660.000	242	598.000.000
30	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	217.500.000	100	93.750.000	5	63.750.000	108	375.000.000
31	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	217.500.000	133	93.750.000	10	63.750.000	83	375.000.000
32	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	346.840.000	110	149.500.000	22	101.660.000	101	598.000.000
33	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Agam	346.840.000	45	149.500.000	10	101.660.000	104	598.000.000
34	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	254.504.000	27	109.700.000	11	74.596.000	66	438.800.000
35	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	346.840.000	80	149.500.000	22	101.660.000	144	598.000.000
36	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok	254.504.000	55	109.700.000	13	74.596.000	160	438.800.000
37	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	346.840.000	80	149.500.000	9	101.660.000	320	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
38	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	346.840.000	56	149.500.000	18	101.660.000	61	598.000.000
39	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	254.504.000	55	109.700.000	7	74.596.000	160	438.800.000
40	Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	346.840.000	40	149.500.000	27	101.660.000	84	598.000.000
41	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	346.840.000	85	149.500.000	22	101.660.000	60	598.000.000
42	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	254.504.000	90	109.700.000	35	74.596.000	130	438.800.000
43	Provinsi Riau	Provinsi Riau	217.500.000	43	93.750.000	12	63.750.000	26	375.000.000
44	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis	217.500.000	31	93.750.000	8	63.750.000	26	375.000.000
45	Provinsi Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	254.504.000	56	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
46	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
47	Provinsi Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	254.504.000	52	109.700.000	5	74.596.000	66	438.800.000
48	Provinsi Riau	Kabupaten Pelalawan	254.504.000	40	109.700.000	10	74.596.000	60	438.800.000
49	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	254.504.000	48	109.700.000	12	74.596.000	55	438.800.000
50	Provinsi Riau	Kabupaten Siak	346.840.000	161	149.500.000	11	101.660.000	150	598.000.000
51	Provinsi Riau	Kota Dumai	346.840.000	795	149.500.000	17	101.660.000	160	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
52	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	346.840.000	133	149.500.000	17	101.660.000	25	598.000.000
53	Provinsi Riau	Kabupaten Kepulauan Meranti	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
54	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	254.504.000	200	109.700.000	2	74.596.000	50	438.800.000
55	Provinsi Jambi	Kabupaten Batang Hari	346.840.000	60	149.500.000	17	101.660.000	82	598.000.000
56	Provinsi Jambi	Kabupaten Sarolangun	254.504.000	38	109.700.000	8	74.596.000	96	438.800.000
57	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	254.504.000	38	109.700.000	16	74.596.000	86	438.800.000
58	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	217.500.000	66	93.750.000	3	63.750.000	41	375.000.000
59	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	217.500.000	65	93.750.000	3	63.750.000	100	375.000.000
60	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	346.840.000	390	149.500.000	80	101.660.000	80	598.000.000
61	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	254.504.000	194	109.700.000	14	74.596.000	80	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
62	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	254.504.000	500	109.700.000	11	74.596.000	56	438.800.000
63	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	254.504.000	200	109.700.000	11	74.596.000	110	438.800.000
64	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	346.840.000	50	149.500.000	27	101.660.000	80	598.000.000
65	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	346.840.000	56	149.500.000	28	101.660.000	150	598.000.000
66	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	254.504.000	61	109.700.000	4	74.596.000	90	438.800.000
67	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	217.500.000	154	93.750.000	17	63.750.000	60	375.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
68	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	254.504.000	68	109.700.000	8	74.596.000	81	438.800.000
69	Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu	217.500.000	40	93.750.000	5	63.750.000	60	375.000.000
70	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	346.840.000	61	149.500.000	16	101.660.000	188	598.000.000
71	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Seluma	346.840.000	48	149.500.000	17	101.660.000	56	598.000.000
72	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Tengah	346.840.000	112	149.500.000	25	101.660.000	150	598.000.000
73	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	217.500.000	100	93.750.000	5	63.750.000	91	375.000.000
74	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Barat	254.504.000	37	109.700.000	3	74.596.000	180	438.800.000
75	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	254.504.000	160	109.700.000	5	74.596.000	321	438.800.000
76	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	254.504.000	100	109.700.000	6	74.596.000	110	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
77	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Utara	254.504.000	50	109.700.000	12	74.596.000	50	438.800.000
78	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Timur	254.504.000	70	109.700.000	14	74.596.000	50	438.800.000
79	Provinsi Lampung	Kabupaten Tanggamus	254.504.000	65	109.700.000	6	74.596.000	102	438.800.000
80	Provinsi Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	254.504.000	40	109.700.000	4	74.596.000	136	438.800.000
81	Provinsi Lampung	Kabupaten Way Kanan	254.504.000	40	109.700.000	6	74.596.000	60	438.800.000
82	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	254.504.000	54	109.700.000	14	74.596.000	72	438.800.000
83	Provinsi Lampung	Kota Metro	254.504.000	55	109.700.000	14	74.596.000	50	438.800.000
84	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesawaran	254.504.000	55	109.700.000	15	74.596.000	145	438.800.000
85	Provinsi Lampung	Kabupaten Pringsewu	254.504.000	38	109.700.000	2	74.596.000	118	438.800.000
86	Provinsi Lampung	Kabupaten Mesuji	254.504.000	40	109.700.000	6	74.596.000	210	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
87	Provinsi Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	254.504.000	65	109.700.000	6	74.596.000	85	438.800.000
88	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat	254.504.000	45	109.700.000	3	74.596.000	200	438.800.000
89	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	346.840.000	1.690	149.500.000	8	101.660.000	75	598.000.000
90	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	217.500.000	59	93.750.000	5	63.750.000	70	375.000.000
91	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	217.500.000	105	93.750.000	13	63.750.000	116	375.000.000
92	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	217.500.000	100	93.750.000	9	63.750.000	50	375.000.000
93	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bogor	254.504.000	1.062	109.700.000	6	74.596.000	112	438.800.000
94	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	254.504.000	80	109.700.000	14	74.596.000	240	438.800.000
95	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	217.500.000	100	93.750.000	10	63.750.000	62	375.000.000
96	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	254.504.000	90	109.700.000	11	74.596.000	117	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
97	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	254.504.000	40	109.700.000	11	74.596.000	240	438.800.000
98	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	254.504.000	40	109.700.000	32	74.596.000	52	438.800.000
99	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	217.500.000	240	93.750.000	3	63.750.000	100	375.000.000
100	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
101	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	346.840.000	56	149.500.000	20	101.660.000	72	598.000.000
102	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	254.504.000	100	109.700.000	10	74.596.000	200	438.800.000
103	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	254.504.000	68	109.700.000	8	74.596.000	192	438.800.000
104	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	217.500.000	45	93.750.000	13	63.750.000	26	375.000.000
105	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	254.504.000	60	109.700.000	13	74.596.000	125	438.800.000
106	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	254.504.000	50	109.700.000	12	74.596.000	595	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
107	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	254.504.000	40	109.700.000	4	74.596.000	200	438.800.000
108	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	346.840.000	50	149.500.000	6	101.660.000	315	598.000.000
109	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	346.840.000	180	149.500.000	8	101.660.000	130	598.000.000
110	Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	346.840.000	875	149.500.000	21	101.660.000	253	598.000.000
111	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Bantul	346.840.000	90	149.500.000	17	101.660.000	40	598.000.000
112	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul	346.840.000	250	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
113	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Sleman	346.840.000	232	149.500.000	30	101.660.000	520	598.000.000
114	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	346.840.000	140	149.500.000	21	101.660.000	495	598.000.000
115	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	217.500.000	100	93.750.000	12	63.750.000	155	375.000.000
116	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jember	254.504.000	160	109.700.000	12	74.596.000	180	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
117	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Malang	217.500.000	110	93.750.000	2	63.750.000	90	375.000.000
118	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	254.504.000	90	109.700.000	30	74.596.000	68	438.800.000
119	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	254.504.000	225	109.700.000	17	74.596.000	580	438.800.000
120	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	254.504.000	60	109.700.000	4	74.596.000	57	438.800.000
121	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	254.504.000	90	109.700.000	16	74.596.000	250	438.800.000
122	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	254.504.000	32	109.700.000	12	74.596.000	40	438.800.000
123	Provinsi Jawa Timur	Kota Mojokerto	254.504.000	40	109.700.000	16	74.596.000	140	438.800.000
124	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	254.504.000	20	109.700.000	6	74.596.000	185	438.800.000
125	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	346.840.000	60	149.500.000	13	101.660.000	70	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
126	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	217.500.000	45	93.750.000	7	63.750.000	100	375.000.000
127	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang	346.840.000	92	149.500.000	40	101.660.000	815	598.000.000
128	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang	254.504.000	435	109.700.000	5	74.596.000	112	438.800.000
129	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	217.500.000	40	93.750.000	7	63.750.000	100	375.000.000
130	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	254.504.000	150	109.700.000	7	74.596.000	50	438.800.000
131	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	254.504.000	45	109.700.000	10	74.596.000	50	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
132	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	254.504.000	79	109.700.000	41	74.596.000	543	438.800.000
133	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	217.500.000	31	93.750.000	12	63.750.000	40	375.000.000
134	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara	254.504.000	24	109.700.000	14	74.596.000	40	438.800.000
135	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	217.500.000	25	93.750.000	6	63.750.000	52	375.000.000
136	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	254.504.000	61	109.700.000	15	74.596.000	40	438.800.000
137	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	254.504.000	44	109.700.000	15	74.596.000	42	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
138	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau	346.840.000	70	149.500.000	24	101.660.000	86	598.000.000
139	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	163.502.000	31	93.750.000	14	117.748.000	31	375.000.000
140	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	254.504.000	50	109.700.000	14	74.596.000	200	438.800.000
141	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	346.840.000	56	149.500.000	48	101.660.000	61	598.000.000
142	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	235.848.000	100	109.700.000	18	93.252.000	43	438.800.000
143	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	42	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
144	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	254.504.000	50	109.700.000	13	74.596.000	57	438.800.000
145	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	254.504.000	38	109.700.000	15	74.596.000	60	438.800.000
146	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	254.504.000	60	109.700.000	1	74.596.000	15	438.800.000
147	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	254.504.000	160	109.700.000	13	74.596.000	55	438.800.000
148	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	217.500.000	46	93.750.000	11	63.750.000	26	375.000.000
149	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	346.840.000	60	149.500.000	8	101.660.000	80	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
150	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	254.504.000	38	109.700.000	14	74.596.000	40	438.800.000
151	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang	346.840.000	800	149.500.000	17	101.660.000	160	598.000.000
152	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	346.840.000	280	149.500.000	20	101.660.000	30	598.000.000
153	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	254.504.000	210	109.700.000	10	74.596.000	200	438.800.000
154	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	254.504.000	100	109.700.000	10	74.596.000	130	438.800.000
155	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	254.504.000	40	109.700.000	12	74.596.000	42	438.800.000
156	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	346.840.000	78	149.500.000	11	101.660.000	64	598.000.000
157	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	346.840.000	80	149.500.000	4	101.660.000	180	598.000.000
158	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara	254.504.000	35	109.700.000	6	74.596.000	30	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
159	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	346.840.000	90	149.500.000	8	101.660.000	45	598.000.000
160	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	254.504.000	25	109.700.000	8	74.596.000	100	438.800.000
161	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah	217.500.000	80	93.750.000	5	63.750.000	51	375.000.000
162	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan	254.504.000	25	109.700.000	9	74.596.000	4	438.800.000
163	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	346.840.000	95	149.500.000	9	101.660.000	55	598.000.000
164	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	254.504.000	40	109.700.000	13	74.596.000	42	438.800.000
165	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	254.504.000	80	109.700.000	8	74.596.000	135	438.800.000
166	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Tojo Una Una	208.430.000	40	137.125.000	7	93.245.000	154	438.800.000
167	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi	254.504.000	55	109.700.000	8	74.596.000	160	438.800.000
168	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Laut	254.504.000	34	109.700.000	8	74.596.000	57	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
169	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali Utara	254.504.000	130	109.700.000	3	74.596.000	100	438.800.000
170	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	346.840.000	80	149.500.000	3	101.660.000	54	598.000.000
171	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	254.504.000	50	109.700.000	12	74.596.000	50	438.800.000
172	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	254.504.000	60	109.700.000	10	74.596.000	25	438.800.000
173	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang	254.504.000	38	109.700.000	16	74.596.000	60	438.800.000
174	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	254.504.000	90	109.700.000	12	74.596.000	32	438.800.000
175	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	254.504.000	91	109.700.000	14	74.596.000	62	438.800.000
176	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Utara	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
177	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	217.500.000	50	93.750.000	5	63.750.000	100	375.000.000
178	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	254.504.000	40	109.700.000	4	74.596.000	40	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
179	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	254.504.000	38	109.700.000	15	74.596.000	70	438.800.000
180	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	254.504.000	70	109.700.000	6	74.596.000	60	438.800.000
181	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	254.504.000	80	109.700.000	12	74.596.000	35	438.800.000
182	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	50	438.800.000
183	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	346.840.000	32	149.500.000	21	101.660.000	360	598.000.000
184	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	346.840.000	40	149.500.000	6	101.660.000	35	598.000.000
185	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	217.500.000	9	93.750.000	11	63.750.000	70	375.000.000
186	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	254.504.000	38	109.700.000	8	74.596.000	51	438.800.000
187	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-bau	254.504.000	38	109.700.000	5	74.596.000	80	438.800.000
188	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	217.500.000	60	93.750.000	2	63.750.000	100	375.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
189	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana	217.500.000	23	93.750.000	5	63.750.000	120	375.000.000
190	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	254.504.000	30	109.700.000	3	74.596.000	79	438.800.000
191	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Utara	254.504.000	30	109.700.000	12	74.596.000	56	438.800.000
192	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Utara	254.504.000	26	109.700.000	8	74.596.000	100	438.800.000
193	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna Barat	346.840.000	40	149.500.000	4	101.660.000	140	598.000.000
194	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Tengah	254.504.000	50	109.700.000	4	74.596.000	100	438.800.000
195	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	346.840.000	225	149.500.000	12	101.660.000	40	598.000.000
196	Provinsi Bali	Provinsi Bali	217.500.000	328	93.750.000	14	63.750.000	65	375.000.000
197	Provinsi Bali	Kabupaten Bangli	254.504.000	44	109.700.000	16	74.596.000	22	438.800.000
198	Provinsi Bali	Kabupaten Jembrana	254.504.000	60	109.700.000	36	74.596.000	50	438.800.000
199	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	254.504.000	37	109.700.000	12	74.596.000	27	438.800.000
200	Provinsi Bali	Kota Denpasar	346.840.000	150	149.500.000	8	101.660.000	60	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
201	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat	254.504.000	130	109.700.000	13	74.596.000	80	438.800.000
202	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	346.840.000	130	149.500.000	17	101.660.000	95	598.000.000
203	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Dompu	346.840.000	110	149.500.000	18	101.660.000	41	598.000.000
204	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	346.840.000	76	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
205	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	217.500.000	131	93.750.000	12	63.750.000	122	375.000.000
206	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur	346.840.000	275	149.500.000	26	101.660.000	64	598.000.000
207	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa	254.504.000	105	109.700.000	14	74.596.000	100	438.800.000
208	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
209	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	346.840.000	80	149.500.000	21	101.660.000	130	598.000.000
210	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa Barat	254.504.000	44	109.700.000	18	74.596.000	40	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
211	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	346.840.000	165	149.500.000	17	101.660.000	97	598.000.000
212	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur	217.500.000	70	93.750.000	12	63.750.000	75	375.000.000
213	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu	346.840.000	47	149.500.000	14	101.660.000	85	598.000.000
214	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Timur	254.504.000	323	109.700.000	6	74.596.000	567	438.800.000
215	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	254.504.000	217	109.700.000	8	74.596.000	132	438.800.000
216	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	254.504.000	533	109.700.000	6	74.596.000	180	438.800.000
217	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Rote Ndao	346.840.000	106	149.500.000	20	101.660.000	93	598.000.000
218	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	254.504.000	71	109.700.000	10	74.596.000	60	438.800.000
219	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Tengah	254.504.000	395	109.700.000	10	74.596.000	65	438.800.000
220	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sabu Raijua	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
221	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku	254.504.000	180	109.700.000	3	74.596.000	70	438.800.000
222	Provinsi Maluku	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
223	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru	254.504.000	73	109.700.000	5	74.596.000	140	438.800.000
224	Provinsi Maluku	Kota Ambon	346.840.000	95	149.500.000	25	101.660.000	200	598.000.000
225	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat	254.504.000	72	109.700.000	8	74.596.000	60	438.800.000
226	Provinsi Maluku	Kota Tual	346.840.000	45	149.500.000	12	101.660.000	61	598.000.000
227	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Barat Daya	346.840.000	30	149.500.000	8	101.660.000	120	598.000.000
228	Provinsi Papua	Provinsi Papua	217.500.000	31	93.750.000	2	63.750.000	25	375.000.000
229	Provinsi Papua	Kabupaten Keerom	346.840.000	25	149.500.000	21	101.660.000	145	598.000.000
230	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara	217.500.000	16	93.750.000	7	63.750.000	41	375.000.000
231	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	346.840.000	44	149.500.000	16	101.660.000	80	598.000.000
232	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate	346.840.000	50	149.500.000	12	101.660.000	135	598.000.000
233	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	346.840.000	25	149.500.000	8	101.660.000	300	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
234	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur	254.504.000	22	109.700.000	12	74.596.000	40	438.800.000
235	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Selatan	217.500.000	35	93.750.000	13	63.750.000	27	375.000.000
236	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
237	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Kepulauan Sula	346.840.000	40	149.500.000	7	101.660.000	55	598.000.000
238	Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	254.504.000	50	109.700.000	3	74.596.000	3	438.800.000
239	Provinsi Banten	Provinsi Banten	217.500.000	58	93.750.000	7	63.750.000	23	375.000.000
240	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	254.504.000	40	109.700.000	15	74.596.000	51	438.800.000
241	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	254.504.000	38	109.700.000	16	74.596.000	80	438.800.000
242	Provinsi Banten	Kota Cilegon	346.840.000	75	149.500.000	4	101.660.000	38	598.000.000
243	Provinsi Banten	Kota Serang	254.504.000	100	109.700.000	7	74.596.000	160	438.800.000
244	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	254.504.000	257	109.700.000	14	74.596.000	105	438.800.000
245	Provinsi Bangka Belitung	Provinsi Bangka Belitung	217.500.000	20	93.750.000	8	63.750.000	60	375.000.000
246	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	217.500.000	30	93.750.000	11	63.750.000	35	375.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
247	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	254.504.000	30	109.700.000	12	74.596.000	120	438.800.000
248	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Tengah	346.840.000	65	149.500.000	24	101.660.000	83	598.000.000
249	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat	254.504.000	20	109.700.000	14	74.596.000	80	438.800.000
250	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	254.504.000	40	109.700.000	16	74.596.000	140	438.800.000
251	Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	217.500.000	40	93.750.000	10	63.750.000	72	375.000.000
252	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo	254.504.000	150	109.700.000	4	74.596.000	120	438.800.000
253	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	346.840.000	50	149.500.000	10	101.660.000	200	598.000.000
254	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
255	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	254.504.000	30	109.700.000	10	74.596.000	100	438.800.000
256	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
257	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	346.840.000	505	149.500.000	19	101.660.000	72	598.000.000
258	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	346.840.000	45	149.500.000	34	101.660.000	61	598.000.000
259	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas	346.840.000	90	149.500.000	17	101.660.000	83	598.000.000
260	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	346.840.000	235	149.500.000	33	101.660.000	678	598.000.000
261	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	346.840.000	90	149.500.000	21	101.660.000	32	598.000.000
262	Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat	254.504.000	60	109.700.000	6	74.596.000	120	438.800.000
263	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Fak Fak	346.840.000	60	149.500.000	16	101.660.000	126	598.000.000
264	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Teluk Wondama	254.504.000	40	109.700.000	4	74.596.000	80	438.800.000
265	Provinsi Papua Barat Daya	Kabupaten Raja Ampat	217.500.000	35	93.750.000	6	63.750.000	60	375.000.000
266	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
267	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	346.840.000	20	149.500.000	5	101.660.000	58	598.000.000
268	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	346.840.000	80	149.500.000	17	101.660.000	75	598.000.000
269	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	254.504.000	27	109.700.000	7	74.596.000	85	438.800.000
270	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	217.500.000	31	93.750.000	12	63.750.000	26	375.000.000
271	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	254.504.000	76	109.700.000	28	74.596.000	80	438.800.000
272	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau	254.504.000	38	109.700.000	13	74.596.000	40	438.800.000
273	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Tana Tidung	346.840.000	56	149.500.000	17	101.660.000	61	598.000.000
274	Provinsi Papua Selatan	Kabupaten Asmat	346.840.000	8	149.500.000	16	101.660.000	61	598.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2023						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Sasaran (Orang)	BOPPA Pencegahan (25%)	Sasaran (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Sasaran (Orang)	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
275	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Mimika	254.504.000	200	109.700.000	12	74.596.000	10	438.800.000
Total			76.441.272.000	31.604	33.027.425.000 0	3.502	22.531.303.000 0	29.318	132.000.000.000 0

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓